



JPPK

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Keguruan
Vol. 1 No. 2 Bulan Desember Tahun 2025, pp. 110-119

E-ISSN : 3109-9297 | Email : jurnaljppk@gmail.com

Website: <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/JPPK>



KALIMASADA
group

PERAN PENDIDIKAN DALAM MENGUBAH STRATAFIKASI SOSIAL

Haniatul Kiromah¹, Nur Khasanah²

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: Haniatul617@gmail.com Nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Received: 17 September 2025 **Revised:** 28 Oktober 2025 **Accepted:** 12 November 2025

Published: 05 Desember 2025 **DOI:** <https://doi.org/10.59966/jqjdpv54>

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam menekan tingkat stratifikasi sosial melalui empat aspek utama. Pertama, pemerataan akses, yang meliputi perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, perumahan layak, layanan sosial, perlindungan hukum, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Kedua, reformasi kurikulum, dengan fokus pada pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan hidup, integrasi pendidikan vokasional di sekolah menengah, penyediaan akses pendidikan digital yang merata, pengurangan orientasi berlebihan pada prestasi akademik semata, peningkatan kesadaran sosial dan keadilan sosial, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, kebijakan inklusi sosial, yang mencakup kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang setara, akses terhadap layanan kesehatan dan perumahan terjangkau, perlindungan sosial dan bantuan bagi kelompok rentan, partisipasi politik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, serta kebijakan anti-diskriminasi dan pemerataan akses terhadap teknologi serta infrastruktur digital. Keempat, pendanaan dan beasiswa, melalui berbagai program seperti beasiswa berbasis ekonomi, pendidikan gratis, beasiswa akademik dan non-akademik, dukungan dana untuk pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, termasuk kesempatan belajar di luar negeri, serta subsidi dan program pemerintah untuk pemerataan pendidikan di daerah terpencil yang dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan.

Kata Kunci: Pendidikan, Stratifikasi, Sosial, Stratifikasi Sosial.

ABSTRACT

The research findings indicate that education plays a vital role in reducing social stratification through four main dimensions. First, equal access, which includes expanding opportunities in education, healthcare, employment, adequate housing, social services, legal protection, and access to technology and information. Second, curriculum reform, which focuses on developing inclusive and relevant curricula, strengthening character education and life skills, integrating vocational education at the secondary level, ensuring equitable access to digital learning, reducing overemphasis on academic achievement, promoting social awareness and justice education, and enhancing teacher training programs. Third, social inclusion policies, which encompass inclusive education and employment policies, access to healthcare and affordable housing, social protection and welfare programs for vulnerable groups, inclusive political participation, anti-discrimination initiatives, and equal access to technology and digital infrastructure. Fourth, funding and scholarships, including economic-based scholarships, free education programs, academic and non-academic scholarships, funding for vocational and higher education, opportunities for international study, as well as government subsidies and educational programs for remote areas combined with skill training initiatives.

Keywords: Education, Stratification, Social, Social Stratification

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana masyarakat terbagi ke dalam beberapa lapisan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat ekonomi, kekuasaan, pendidikan, dan status sosial. Setiap lapisan sosial mencerminkan posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi peran, kesempatan, serta akses mereka terhadap berbagai sumber daya (Yusuf, 2024). Dalam kehidupan sosial, stratifikasi terbentuk secara alami akibat adanya perbedaan ekonomi, politik, dan budaya yang kemudian berkembang menjadi sistem sosial yang mengatur pola interaksi dan mobilitas individu dalam masyarakat (Maulidar, 2018).

Secara umum, stratifikasi sosial bersifat universal karena setiap masyarakat memiliki bentuk dan pola stratifikasi yang berbeda-beda, tergantung pada nilai, sistem, dan struktur sosial yang berlaku (Maunah, 2015). Meskipun berfungsi sebagai mekanisme pengatur tatanan sosial, stratifikasi sering kali juga berperan dalam mempertahankan ketimpangan, sehingga memunculkan perbedaan dalam hal hak, status, dan kesempatan antarindividu maupun antarkelompok (Aji, 2016).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya stratifikasi sosial antara lain aspek ekonomi seperti pendapatan dan kepemilikan kekayaan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta faktor budaya dan modal sosial yang dimiliki individu atau kelompok (Lue & Palupi, 2022). Dalam berbagai sistem masyarakat baik feodal, kapitalis, maupun komunis stratifikasi muncul dengan bentuk yang berbeda, namun tetap berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial (Pattinasarany, 2016).

Oleh karena itu, kajian tentang stratifikasi sosial menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur sosial bekerja dan bagaimana ketimpangan terbentuk di dalamnya. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif guna mengurangi kesenjangan antar kelas sosial, serta menciptakan tatanan sosial yang setara dalam hal hak dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk memahami konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu tentang stratifikasi sosial. Pendekatan ini penting karena memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis bagaimana stratifikasi sosial terbentuk, berfungsi, dan berdampak pada masyarakat. Langkah penelitian meliputi pengumpulan sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi teori-teori utama tentang stratifikasi sosial. Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti menyusun kerangka teoretis dan hipotesis penelitian yang menjadi dasar analisis lebih lanjut terhadap fenomena sosial tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerataan Akses

Dalam konteks stratifikasi sosial, pemerataan akses merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan setiap individu maupun kelompok masyarakat, tanpa memandang kelas sosial, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial (Maunah, 2015). Pemerataan akses menjadi hal yang krusial karena ketimpangan dalam memperoleh sumber daya tersebut sering kali memperkuat struktur stratifikasi sosial, di mana kelompok berpenghasilan tinggi lebih mudah mendapatkan keuntungan, sedangkan kelompok kurang mampu tetap terjebak dalam keterbatasan (Mardizal dkk., 2024).

Terdapat beberapa bidang utama yang menjadi fokus dalam pemerataan akses guna meminimalkan dampak stratifikasi sosial, antara lain:

a. Pemerataan Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan mobilitas sosial, namun

kenyataannya akses terhadap pendidikan berkualitas masih banyak didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sekolah negeri, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta pemberlakuan program subsidi pendidikan. Pemerintah juga dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional agar semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang setara (Afriansyah, 2022). Melalui akses pendidikan yang merata, masyarakat dari kelas sosial bawah pun dapat memperoleh kemampuan dan pekerjaan yang lebih baik sehingga meningkatkan taraf hidup dan status sosial mereka.

b. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap individu, namun akses terhadap layanan kesehatan yang layak masih banyak terbatas pada kelompok berpenghasilan tinggi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sistem jaminan kesehatan nasional yang komprehensif, peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan, serta ketersediaan obat dan tenaga medis dengan biaya terjangkau (Alif dkk., 2023). Dengan pemerataan layanan kesehatan, semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang layak, meningkatkan produktivitas, serta menekan beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi.

c. Pemerataan Akses Ekonomi dan Pekerjaan

Kesempatan kerja dan pendapatan yang stabil merupakan faktor penting dalam menentukan posisi sosial seseorang. Namun, kelompok sosial bawah sering kali hanya memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi. Pemerintah bersama sektor swasta dapat berperan dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal, serta menetapkan kebijakan upah yang adil. Selain itu, program kredit mikro juga dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat kelas bawah mengembangkan usaha kecil (Restiyanto, Dumadi Tri & Nanang Yusroni, 2006). Dengan pemerataan akses ekonomi, masyarakat dari berbagai lapisan sosial memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

d. Pemerataan Akses Perumahan dan Layanan Sosial

Tempat tinggal yang layak merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Namun, harga rumah dan sewa yang tinggi sering kali menyulitkan kelompok berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penyediaan rumah terjangkau, program bantuan sewa, dan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat miskin (Putri, Fauziah dkk., 2024). Dengan tersedianya perumahan yang layak, masyarakat dapat hidup di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan sosial mereka.

e. Pemerataan Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang sama. Namun, dalam praktiknya, kelompok dengan kemampuan ekonomi tinggi cenderung lebih mudah mengakses layanan hukum. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan bantuan hukum gratis atau bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin proses peradilan yang adil dan bebas diskriminasi (Abdi, 2024). Dengan akses hukum yang merata, potensi ketidakadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

f. Pemerataan Akses terhadap Teknologi dan Informasi

Di era digital, teknologi dan informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, akses terhadap teknologi masih didominasi oleh kelompok yang lebih sejahtera. Pemerintah dapat memperluas jaringan internet murah, membangun infrastruktur digital di daerah terpencil, serta mengadakan pelatihan literasi

digital bagi masyarakat yang kurang mampu (Abdul Latip, 2020). Dengan akses teknologi yang setara, masyarakat dapat memperoleh informasi, peluang kerja daring, serta layanan digital yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup.

Secara keseluruhan, pemerataan akses di berbagai bidang merupakan langkah fundamental untuk mengurangi ketimpangan akibat stratifikasi sosial. Dengan memastikan kesempatan yang adil dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, perlindungan hukum, dan teknologi, setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Pemerataan akses bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan sinergi antara sektor swasta dan partisipasi masyarakat luas demi terciptanya kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

2. Reformasi kurikulum

Reformasi kurikulum memiliki peran penting dalam mengurangi dampak ketimpangan sosial melalui berbagai strategi yang berfokus pada pemerataan kesempatan dan relevansi pembelajaran. Secara umum, reformasi ini berupaya memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya melayani kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan kesempatan belajar yang adil dan bermakna bagi semua peserta didik.

a. Menciptakan kurikulum yang inklusif dan relevan.

Kurikulum yang terlalu menekankan aspek akademik dan kurang mempertimbangkan konteks sosial sering kali menguntungkan siswa dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi, sementara siswa dari keluarga kurang mampu tertinggal. Reformasi kurikulum perlu diarahkan untuk menyesuaikan isi pembelajaran dengan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk integrasi pendidikan vokasional dan keterampilan hidup. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat bagi mereka yang berprivilegi, tetapi juga menjadi jembatan bagi semua siswa untuk memperoleh keterampilan yang relevan guna melanjutkan pendidikan, bekerja, atau berwirausaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka.

b. Mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup.

Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan empati, serta keterampilan hidup seperti berpikir kritis, komunikasi, dan pengelolaan keuangan, merupakan aspek penting dalam membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Dengan memperkuat kedua aspek ini, siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di dunia nyata. Nilai-nilai karakter dan keterampilan hidup juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan peluang siswa untuk sukses di dunia kerja atau kewirausahaan.

c. Mengintegrasikan pendidikan vokasional di tingkat sekolah menengah.

Pendidikan vokasional berperan strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap pendidikan tinggi, yang umumnya lebih mudah diakses oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Melalui penguatan program vokasional dan kesempatan magang di dunia industri, siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tetap dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini membuka jalan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka secara mandiri.

d. Memperluas akses pendidikan digital.

Di era modern, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Namun, ketimpangan akses terhadap perangkat dan internet sering memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, reformasi kurikulum perlu melibatkan pemanfaatan teknologi melalui penyediaan fasilitas digital, jaringan internet di daerah terpencil, dan pelatihan literasi digital bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Affandi & Tantra, 2022). Dengan pemerataan akses digital, seluruh siswa, tanpa memandang latar

belakang sosial, dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dan berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis teknologi.

e. Mengurangi orientasi pada prestasi akademik semata.

Sistem pendidikan yang terlalu menekankan nilai akademik dapat mengabaikan potensi siswa di bidang lain, khususnya mereka yang tidak memiliki dukungan sumber daya memadai. Dalam reformasi kurikulum, penilaian perlu mencakup bakat, minat, dan keterampilan non-akademik seperti seni, olahraga, kreativitas, serta kemampuan sosial (Ahmad, 2021). Dengan demikian, siswa memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dalam menghargai keberagaman kemampuan.

f. Memperkuat pendidikan kesadaran sosial dan keadilan sosial.

Kurikulum yang menanamkan nilai keadilan sosial dan kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan akan membentuk generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Melalui pengintegrasian materi tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, empati, serta tanggung jawab sosial, siswa akan lebih memahami realitas ketimpangan yang ada dan termotivasi untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara (Suryono, 2019).

g. Peningkatan kompetensi dan pelatihan guru.

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan reformasi kurikulum. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan yang menekankan pada pendekatan pembelajaran inklusif, pemahaman terhadap ketimpangan sosial, dan kemampuan membimbing siswa dari latar belakang beragam (Armansyah dkk., 2024). Guru yang memiliki sensitivitas sosial dan kompetensi pedagogik yang baik akan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih adil, mendukung, dan memotivasi semua siswa untuk berkembang secara optimal.

h. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi kurikulum menjadi instrumen penting dalam mengatasi dampak stratifikasi sosial di bidang pendidikan. Melalui kurikulum yang inklusif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup, pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial bagi peserta didik dari berbagai latar belakang. Reformasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan berkesetaraan.

3. Kebijakan Inklusi Sosial

Kebijakan inklusi sosial hadir sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial dengan membuka akses bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan agar dapat ikut berkembang dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan. Melalui kebijakan inklusi sosial, diharapkan kesenjangan sosial akibat stratifikasi dapat dikurangi, sehingga tercipta masyarakat yang lebih setara dan harmonis. (Haryanti, 2019).

a. Kebijakan Pendidikan yang Inklusif

Pendidikan menjadi jalan utama untuk memperbaiki posisi sosial seseorang. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang layak. Anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas dan biaya. Solusinya, pemerintah dapat memperluas beasiswa, menghadirkan sekolah inklusif yang terbuka bagi semua latar belakang, menekan biaya pendidikan, dan membangun sekolah di daerah tertinggal. (Ra'is, 2018). Dengan pendidikan yang merata, setiap individu memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memperluas mobilitas sosial.

b. Kebijakan Kesempatan Kerja yang Setara

Dunia kerja sering kali mencerminkan stratifikasi sosial, di mana mereka yang memiliki

status sosial tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Untuk mengurangi ketimpangan ini, pemerintah perlu mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerja berpendidikan rendah, menjamin upah yang layak, dan menciptakan lapangan kerja inklusif bagi kelompok marginal. (Pattinasarany, 2016). Kebijakan semacam ini akan membantu masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh penghasilan yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

c. Kebijakan Akses Layanan Kesehatan yang Merata

Akses terhadap kesehatan merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki semua warga. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Untuk itu, pemerintah dapat memperluas sistem jaminan kesehatan, memberikan subsidi bagi masyarakat miskin, serta membangun fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan. (Handayani, 2016). Layanan kesehatan yang merata dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

d. Kebijakan Perumahan yang Terjangkau

Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol kesejahteraan sosial. Banyak keluarga berpenghasilan rendah yang sulit memiliki tempat tinggal layak karena tingginya harga properti. Pemerintah dapat memberikan bantuan perumahan rakyat, pinjaman bersubsidi, atau dukungan biaya sewa bagi keluarga miskin. (Sadiyah & Arianti, 2012). Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat bisa hidup lebih stabil, sehat, dan bermartabat.

e. Kebijakan Perlindungan dan Bantuan Sosial

Kebijakan perlindungan sosial berfungsi melindungi kelompok rentan dari dampak krisis ekonomi dan sosial. Bentuknya bisa berupa bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, atau asuransi bagi pekerja informal. (Pebri, 2022). Dengan adanya bantuan ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.

f. Kebijakan Partisipasi Politik yang Inklusif

Partisipasi politik yang terbuka penting agar semua kelompok masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk terlibat dalam pemilu, menambah kuota representasi bagi kelompok marginal, serta membentuk forum masyarakat yang inklusif. (Maulidar, 2018). Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih mencerminkan kebutuhan seluruh warga, bukan hanya kelompok elit.

g. Kebijakan Anti-Diskriminasi dan Kesetaraan Peluang

Diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik berdasarkan status sosial, jenis kelamin, suku, maupun agama, dapat memperlebar jurang stratifikasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi anti-diskriminasi, memberikan pelatihan tentang kesetaraan di lembaga pendidikan dan tempat kerja, serta menerapkan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. (Dewi Setyowati & Rahayu, 2021). Dengan lingkungan yang lebih adil, setiap individu dapat berkembang sesuai potensinya tanpa hambatan sosial.

h. Kebijakan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital

Di era digital, akses terhadap teknologi dan internet menjadi kunci kemajuan. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakannya. Pemerintah dapat menyediakan internet murah, membangun infrastruktur digital di daerah terpencil, serta memberikan pelatihan literasi digital. (Abdul Latip, 2020). Akses digital yang merata dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berinovasi, sehingga memperkecil kesenjangan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan inklusi sosial menjadi strategi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Melalui pemerataan akses di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, politik, dan teknologi, kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.

4. Pendanaan dan Beasiswa

Pendanaan dan beasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan akibat stratifikasi sosial, khususnya dalam bidang pendidikan. Bantuan keuangan ini memberi peluang bagi siswa dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya. Melalui pendanaan dan beasiswa, pendidikan menjadi jembatan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi. Dengan kata lain, program ini menjadi sarana mobilitas sosial yang membantu menciptakan kesetaraan dalam kesempatan belajar dan berkembang.

a. Beasiswa Berbasis Kebutuhan Ekonomi

Jenis beasiswa ini difokuskan pada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki semangat tinggi untuk bersekolah. Bantuan ini biasanya mencakup biaya sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan harian. Tujuannya agar keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya beasiswa ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat bersaing setara dengan mereka yang lebih beruntung secara ekonomi, sehingga kesenjangan pendidikan dapat dikurangi. (Gustina & Safikha, 2022).

b. Program Sekolah Gratis atau Berbiaya Rendah

Pendidikan dasar hingga menengah merupakan hak setiap anak, namun biaya sering kali menjadi penghambat bagi keluarga miskin. Program sekolah gratis atau berbiaya rendah hadir sebagai solusi agar semua anak, tanpa memandang status sosial, bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendanaan ini memastikan anak-anak di lapisan bawah tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sejak dini. Kebijakan semacam ini tidak hanya menekan ketimpangan di tahap awal pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih setara. (Kahar, 2021).

c. Beasiswa Akademik dan Non-Akademik

Beasiswa jenis ini diberikan kepada siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik seperti olahraga, seni, dan keterampilan. Tujuannya untuk menghargai potensi dan prestasi siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga sederhana. Melalui beasiswa ini, siswa yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus khawatir tentang biaya. Selain itu, penghargaan terhadap berbagai bentuk prestasi juga menumbuhkan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan menghargai keragaman kemampuan. (Kahar, 2021).

d. Pendanaan untuk Pendidikan Vokasional

Pendidikan vokasional atau pelatihan keterampilan menjadi pilihan penting bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus. Namun, biaya pelatihan yang tinggi sering menjadi kendala. Karena itu, pendanaan diarahkan untuk membuka akses yang lebih luas bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa memperoleh keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Program ini berperan besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial melalui pemberdayaan keterampilan praktis. (Hidayat, Yayat & Hartanti, 2019).

e. Pendanaan untuk Pendidikan Anak di Daerah Tertinggal

Ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi karena ekonomi, tetapi juga karena lokasi geografis. Anak-anak di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan fasilitas

belajar. Pendanaan pendidikan di wilayah tertinggal bertujuan menyediakan sarana belajar yang setara dengan sekolah di perkotaan. Dengan bantuan ini, siswa di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. (Syafii, 2018).

f. Program Bantuan dan Subsidi Pendidikan dari Pemerintah

Bantuan pendidikan dari pemerintah dapat berupa uang saku, alat tulis, subsidi biaya sekolah, atau bantuan seragam. Tujuannya adalah memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menyebabkan siswa putus sekolah. Program ini menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap pemerataan pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya kesempatan belajar yang lebih setara bagi semua lapisan masyarakat. (Aliyyah dkk., 2020).

g. Kombinasi Beasiswa dengan Pelatihan Keterampilan

Program inovatif ini tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga membekali penerimanya dengan pelatihan keterampilan tambahan seperti kewirausahaan, literasi digital, atau kemampuan berbahasa asing. Tujuannya agar siswa tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dengan demikian, penerima beasiswa memiliki bekal yang lebih kuat untuk bersaing dan meningkatkan mobilitas sosial secara berkelanjutan. (Aliyyah dkk., 2020).

Secara keseluruhan, pendanaan dan beasiswa bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan kesetaraan sosial. Melalui kebijakan ini, pendidikan menjadi lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan, sehingga setiap individu, tanpa memandang asal sosialnya, memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, program pendanaan dan beasiswa yang tepat dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil serta berkeadilan pendidikan.

KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan akibat stratifikasi sosial melalui empat langkah utama. Pertama, pemerataan akses dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perumahan, layanan sosial, perlindungan hukum, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Kedua, reformasi kurikulum bertujuan menjadikan pendidikan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan pendidikan karakter, keterampilan hidup, pendidikan vokasional, akses digital, kesadaran sosial, serta peningkatan kompetensi guru. Ketiga, kebijakan inklusi sosial berfokus pada penciptaan kesetaraan kesempatan bagi semua orang melalui kebijakan pendidikan inklusif, kesempatan kerja yang setara, akses kesehatan dan perumahan, perlindungan sosial, partisipasi politik, serta pemerataan teknologi dan infrastruktur digital. Keempat, pendanaan dan beasiswa berperan penting dalam memberikan dukungan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah gratis, beasiswa berdasarkan ekonomi dan prestasi, subsidi pendidikan, serta pelatihan keterampilan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, pendidikan menjadi sarana efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong mobilitas sosial yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Abdah, M. G. (2019). Ragam Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). *Fondatia*, 3(1).
- Abdi, R. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang* [Diploma, Universitas Andalas].
<http://scholar.unand.ac.id/478757/>

- Abdul Latip. (2020). Peran Literasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *EduTeach : Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1956>
- Abidin, Z. (2021). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Berbasis Agama, Budaya, Dan Sosiologi. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. http://afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/167
- Affandi, L. H., & Tantra, D. K. (2022). Implication of Constructivism Philosophy on Teacher Professional Development: A Literature Review. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 12(2), hal. 809.
- Afriansyah, A. R. (2022). Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara [Diploma, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/10208/>
- Ahmad, M. (2021). Management of facilities and infrastructure in schools. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 93–112.
- Aji, R. H. S. (2016). Stratifikasi sosial dan kesadaran kelas. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31358>
- Alfina, D. G., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Penerapan Microsite Pada Materi Status, Peran Sosial, Diferensiasi Dan Stratifikasi Sosial Untuk Meningkatkan Literasi Digital Serta Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13979>
- Alif, I. S., Karnay, S., & Amir, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Kesehatan Penanganan Stunting (studi Pada Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 66–89. <https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.66.89>
- Aliyyah, R. R., Ulfah, S. W., Herawati, E. S. B., Rachmadtullah, R., & Asmara, A. S. (2020). Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Armansyah, A., Noviarani, D., & Rusyiana, R. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11601>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Dewi Setyowati, D. S. & Sisca Muji Rahayu. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), hal. 80.
- Gustina, D., & Safikha, Lady. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Dengan Metode Saw Pada SMA Negeri 2 Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.37817/tekinfo.v23i1.1874>
- Haedari, A. (2013). Pendidikan Agama di Indonesia. Jakarta: Puslitbang.
- Handayani, Sri. (2016). Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas baturetno. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 14(1), hal. 45-47.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Talenta Conference Series: Local Social, and Arts (LWSA), 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>
- Hidayat, Yayat, & Hartanti. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dalam tata cara perpajakan terhadap penyelesaian tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), hal. 300-302.
- Kahar, A. (2021). Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan. Indonesia Emas Group.
- Lue, & Palupi, Y. (2022). Ilmu Sosial Dasar. BUKU Karya Dosen IKIP PGRI Wates,

- 1(1), Article 1. <https://repository.ipw.ac.id/index.php/buku-dosen/article/view/29>
- Mardizal, J., Sanusi, Irsyad, & Ramatni, A. (2024). Sosiologi Pendidikan. Jonni Mardizal.
- Maulidar, F. (2018). Habib dan Teuku: Stratifikasi Sosial dan Kontestasi Politik dalam Masyarakat Nagan Raya [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. http://library.ar_raniry.ac.id/
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.1.19-38>
- Pattinasarany, I. R. I. (2016). Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pebri, I. (2022). Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) [Masters, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11578/>
- Putri, Fauziah, Nici Amanda, Istiqamah Fitrah, Fitri Mayang Sari, & Helena Yolanda Putri. (2024). Reformasi birokrasi dalam pengawasan pelayanan publik di kota padang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), hal. 104.
- Ra'is, D. U. (2018). Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa. *REFORMASI*, 7(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v7i2.803>
- Restiyanto, Dumadi Tri, & Nanang Yusroni. (2006). Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), hal. 180.
- Sadiyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang [Other, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/37351/>
- Sari, F. A., & Yasin, M. (2024). Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial: Kebijakan dan Praktek Pendidikan Dalam Mengurangi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), Article 3.
- Suryono, A. (2019). Teori dan Strategi Perubahan Sosial. Bumi Aksara.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v4i2.1535>
- Yusuf, M. (2024). Stratafikasi Sosial dan Korelasinya Dengan Perilaku Hukum. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.19>.